

TANTANGAN KESENJANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DI INDONESIA: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Ria Ulfa Nurisyah¹, Achmad Akmaluddin²

Program Studi Psikologi, Universitas Bina Darma Palembang

riaulfanurisyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission:

Review:

Revised:

Accepted:

Published:

Kata Kunci

Pancasila

Kesenjangan

Ekonomi

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, menghadapi tantangan serius dalam mencapai pembangunan yang merata, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan telah menciptakan jurang yang lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari jutaan rakyat Indonesia. Kesenjangan ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan yang menghambat potensi bangsa dan mengancam stabilitas sosial. Pancasila, sebagai dasar negara, memuat nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengatasi kesenjangan ini, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan. Namun, implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi hambatan, termasuk kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, kebijakan pemerintah yang tidak selalu berpihak pada kelompok rentan, dan dampak globalisasi. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi krusial, terutama melalui pendidikan yang efektif dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mencapai pemerataan pembangunan. Salah satu tantangan utama yang masih menghantui adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari akses yang tidak merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, hingga distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat (Budisusila, 2021).

Kesenjangan sosial dan ekonomi ini bukan hanya permasalahan statistik semata, tetapi juga memiliki dampak nyata pada kehidupan sehari-hari jutaan rakyat Indonesia. Ketidaksetaraan ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana kemiskinan dan ketidakberdayaan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menghambat potensi bangsa secara keseluruhan dan mengancam stabilitas sosial.

Menurut (Anggraini, 2020), Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi kompas dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, memberikan arah bagi upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Akan tetapi, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah belum meratanya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, seringkali tidak efektif dalam membentuk karakter yang berlandaskan Pancasila.

Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak selalu berpihak pada kelompok masyarakat rentan juga turut memperparah kesenjangan. Kebijakan ekonomi yang terlalu fokus pada pertumbuhan, tanpa memperhatikan aspek pemerataan, seringkali menguntungkan kelompok masyarakat kaya dan mengabaikan kelompok masyarakat miskin. Globalisasi, yang membawa serta arus informasi dan teknologi, juga memiliki dampak ganda. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan konektivitas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat memperlebar jurang kesenjangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan informasi.

Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial. Nilai keadilan sosial, yang termaktub dalam sila kelima, harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Keadilan sosial bukan hanya berarti pemerataan pendapatan, tetapi juga pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Nilai persatuan, yang termaktub dalam sila ketiga, juga sangat penting untuk mengatasi kesenjangan. Persatuan dan gotong royong antar kelompok masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras, dapat menjadi kekuatan besar dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Nilai kerakyatan yang tertuang dalam sila keempat menekankan pentingnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut merumuskan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Pendidikan Pancasila harus direvitalisasi dan diperkuat, bukan hanya sebagai mata kuliah formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembentukan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini, agar generasi muda memiliki kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial (Antari, 2020).

Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan. Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses terhadap modal dan teknologi, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok miskin. Selain itu, peran aktif masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting. Mereka dapat berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok rentan, serta mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan menyeluruh, serta kerja sama semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila.

Metode

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan atau studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data atau informasi penelitian

dengan cara membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu uraian yang teratur mengenai data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Penulis menggunakan berbagai sumber kepustakaan dan data sensus internet yang mengungkap tanggung jawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu, penulis mengolah data dari berbagai sumber isu internet. Berbagai variasi dan sumber referensi yang tersedia membuat penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila bukanlah wahana melainkan ruh yang harus tetap hidup karena tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara, berdirilah pilar-pilar negara. Ada empat pilar yang ditegakkan di atas dasar negara, yaitu: 1) Proklamasi Kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), 2) UUD 1945, 3) NKRI, 4) Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa adanya landasan, pilar-pilar tersebut akan hanyut. Pancasila sebagai dasar memberikan ruh dan warna bagi pilar-pilar yang ditegakkan di atasnya (Antari, 2020).

Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sangat penting di dunia saat ini, selain juga untuk berhubungan dengan sesama dan lingkungan. Panduan kita dapat ditemukan dalam Pancasila, yang dapat merangkul semua perbedaan tanpa menciptakan perpecahan. Agar cita-cita luhur Pancasila tidak terkikis dalam diri kita, setiap warga negara harus menyadari perlunya membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan nilai-nilai ini di mana pun (Ardhan, 2022).

Menurut (Siregar, 2024), pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang mengandung nilai karakter. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah :

1. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya menegaskan keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
-

2. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menempatkan manusia Indonesia sebagai bagian integral dari komunitas global, yang menjunjung tinggi kesetaraan harkat, derajat, dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Nilai kemanusiaan ini menekankan hubungan timbal balik antarindividu, yang diwujudkan melalui rasa cinta kasih, saling menghormati hak asasi manusia, dan gotong royong. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan sosial, penghidupan yang layak, hak politik, dan kesetaraan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau latar belakang lainnya.
3. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," mengajarkan pentingnya nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan bangsa. Perbedaan yang ada di Indonesia, seperti suku, agama, ras, dan golongan, adalah anugerah yang harus disyukuri dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan diikat dengan rasa persatuan yang kuat untuk mencegah perpecahan dan disintegrasi bangsa.
4. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan nilai demokrasi dan permusyawaratan dalam kehidupan bernegara. Nilai kerakyatan ini mengandung tanggung jawab, harmoni, kekeluargaan, dan gotong royong, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia sebagai negara demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, di mana pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya.
5. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan diwujudkan melalui pemberian hak orang lain, perlakuan adil, penggunaan hak milik yang tidak merugikan kepentingan umum, serta penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, kesetaraan, kesejahteraan sosial, penghormatan HAM, dan persamaan hak di segala bidang.

Menurut (Makmur, 2024), salah satu situasi atau keadaan tidak merata yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat adalah ketimpangan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami konsep-konsep yang diperlukan untuk memperbaiki setidaknya beberapa tindakan, perilaku, dan hasil negatif yang merugikan terkait kemiskinan dan ketimpangan

pada populasi tertentu secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun internasional, perlu juga dibahas teori keadilan sosial. Ketimpangan sosial adalah distribusi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang tidak merata yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap signifikan dalam suatu masyarakat, dan evaluasinya tidak sama dan disampaikan berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Masalah sosial disebabkan oleh perbedaan antara nilai-nilai masyarakat dan realitas saat ini.

Menurut (Fabela, 2024), setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan sosial adalah :

1. Kemiskinan Ada lima perangkat kemiskinan, yaitu :
 - a. Kemiskinan itu sendiri
 - b. Kelemahan fisik
 - c. Keterasingan atau tingkat keterasingan
 - d. Kerentanan
 - e. Ketidakberdayaan.
 2. Sempitnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja Sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor terpenting terjadinya ketimpangan, karena sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan berdampak pada rendahnya perekonomian. Dampak ketimpangan terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif, yaitu :
 - a. Dampak positif 1
 - 1) Ketimpangan dapat menjadi suatu kejadian yang akan membuat suatu daerah berkembang ke arah yang lebih baik dari sebelumnya
 - 2) Ketimpangan dapat menumbuhkan rasa empati antar kelompok untuk saling membantu
 - 3) Ketimpangan dapat meminimalisir mentalitas seseorang sehingga tidak mudah merasa puas
 - 4) Ketimpangan mengajarkan masyarakat untuk menjadi orang yang berguna dan memiliki mentalitas dalam hidup, 5) Ketimpangan mendorong masyarakat untuk lebih banyak bersyukur.
-

- b. Dampak Negatif Ketimpangan dapat memicu kesombongan, Ketimpangan dapat memicu tingginya angka kriminalitas yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial.

Menurut (Novitasari, 2023), kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat semakin terlihat karena sebagian masyarakat Indonesia kurang mampu mengikuti arus globalisasi, yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengikuti arus globalisasi. Ketimpangan sosial merupakan perbedaan ekonomi atau pendapatan antara satu individu dengan individu lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial yaitu perbedaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, dan lain-lain. Ketimpangan sosial memiliki beberapa dampak, antara lain: meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya kasus kriminalitas atau kriminalitas. Dampak globalisasi memiliki ciri-ciri yaitu dirasakan oleh sebagian masyarakat, kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan. Ketimpangan sosial dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara tepat, menjamin akses bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, menciptakan lapangan kerja, dan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan.

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia. Tantangan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hingga distribusi pendapatan yang tidak merata. Berikut adalah beberapa tantangan utama kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia :

1. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata menjadi faktor utama dalam kesenjangan sosial. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih terbatas, akses terhadap informasi yang kurang, dan partisipasi sosial yang rendah.

2. Ketidakmerataan Akses Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan dalam akses kesehatan dapat menyebabkan perbedaan dalam angka harapan hidup, tingkat penyakit, dan kualitas hidup.

3. Distribusi Pendapatan Tidak Merata

Ketimpangan distribusi pendapatan, akses terhadap modal, dan peluang ekonomi merupakan faktor penting dalam kesenjangan sosial. Konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil masyarakat dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok lain dapat menciptakan jurang yang lebar antara kaya dan miskin.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan akar dari banyak masalah kesenjangan sosial. Kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta dapat menyebabkan isolasi sosial dan marginalisasi.

5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan yang Merata

Distribusi lapangan pekerjaan yang tidak merata di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menjadi salah satu pemicu utama kesenjangan sosial. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan mendorong urbanisasi yang berlebihan, yang kemudian menciptakan masalah baru di perkotaan, seperti permukiman kumuh dan pengangguran.

6. Perbedaan Status Sosial

Perbedaan status sosial, yang sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau pendidikan, dapat menciptakan hierarki sosial yang kaku. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta membatasi mobilitas sosial.

7. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, dengan pulau-pulau yang tersebar dan kondisi alam yang berbeda-beda, dapat menyebabkan perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur, sumber daya alam, dan layanan publik. Wilayah-wilayah terpencil atau dengan kondisi alam yang sulit sering kali tertinggal dalam pembangunan.

Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa cara implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial :

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama
 - b. Menciptakan masyarakat yang berlandaskan moral dan etika yang kuat
 - c. Menghindari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan
2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap individu
 - b. Membangun rasa empati dan kepedulian terhadap sesama
 - c. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan
3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
 - a. Memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air
 - b. Membangun persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman
 - c. Menghindari konflik dan perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas nasional
4. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
 - b. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah
 - c. Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
 - b. Memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
 - c. Melindungi kelompok masyarakat rentan dan marginal dari ketidakadilan

Kesimpulan

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidaksetaraan. Pancasila, sebagai dasar negara, memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam mengatasi kesenjangan ini. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, kebijakan pemerintah yang tidak selalu berpihak pada kelompok masyarakat rentan, dan dampak globalisasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten dan komprehensif, khususnya keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan. Pendidikan Pancasila harus direvitalisasi dan diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok masyarakat rentan. Peran aktif masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting. Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila..

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*.
- Antari, L. P. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*.
- Ardhan, M. D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Budisusila, A. (2021). *Transformasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Fabela, Z. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*.
- Hamdani, A. F. (2024). Implementasi Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Indonesian Research Journal on Education*.
- Makmur, A. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*.
- Novitasari, S. (2023). Pentingnya peran Pancasila bagi generasi muda dalam menghadapi globalisasi. *no june*.
- Sari, R. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*.
- Sianturi, Y. R. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Siregar, I. (2024). Peran Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional PPGFKIP UPR*.
-